

Pengaruh *Leverage*, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020

Muhammad Raihanul Alfi^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: mhdraihanulalfi@gmail.com

Tanggal Masuk:

22 November 2022

Tanggal Revisi:

12 Mei 2023

Tanggal Diterima:

27 Juni 2023

Keywords: *Local*

Government Financial Performance; Leverage; Population; Age of Local Government.

How to cite (APA 6th style)

Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh *Leverage*, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (3), 1098-1114.

Abstract

This study aims to determine the effect of leverage, population and age of local government on local government financial performance. The population in this study is Regency/City in West Sumatra Province in 2016-2020. This study uses secondary data. The sampling technique used the total sampling method with a sample of 19 districts/cities with a period of 5 years. This study uses multiple linear regression analysis on hypothesis testing. The results showed that the leverage and age of the local government had a positive and significant effect on the financial performance of the local government. While the population has a negative and significant effect on the financial performance of local governments.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki daerah untuk merumuskan peraturan daerah, membentuk, mengatur dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015). Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengelola sendiri keuangan daerah yang diperoleh melalui pemanfaatan potensi daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh setiap daerah di Indonesia. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), seperti kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah (Rodonuwu, 2015). Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah dapat dijadikan acuan dalam menilai seberapa baik kinerja keuangan

pemerintah daerah, apakah pendanaan daerah sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atau apakah alokasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Aziz, 2016).

Mulyani & Wibowo (2017) mendefinisikan kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dalam bidang keuangan daerah termasuk pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditentukan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama periode anggaran. Turley et al (2015) menyatakan bahwa penting untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah karena kita dapat mengidentifikasi apakah kinerja keuangan pemerintah daerah relatif kuat atau lemah dan untuk membantu masyarakat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih mudah serta dapat membedakan antara pemerintah daerah yang berkinerja relatif baik dengan pemerintah daerah yang menunjukkan tanda-tanda masalah keuangan. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan daerah digunakan untuk mencerminkan penilaian atas tanggung jawab dan kemampuan daerah untuk menjalankan otonominya. Pilcher & Pilcher (2006) berpendapat bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja keuangan mereka dari waktu ke waktu, sehingga membuat kinerja keuangan lebih transparan, membantu memperjelas tujuan dan tanggungjawab pemerintah, menginformasikan kepada masyarakat luas tentang kinerja keuangan serta dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah penerapan rasio keuangan terhadap APBD. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan daerah terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi sumber pendapatan keuangan daerahnya untuk memperbaiki keadaan finansial dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat guna terealisasinya otonomi daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Beberapa tahun terakhir, kinerja pengelolaan keuangan daerah di sejumlah provinsi banyak mendapatkan penilaian yang kurang baik, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumatera Barat mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi mengatakan, "Bahwa DPRD Sumatera Barat masih menyoroti terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal dan kondisi itu juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya" (sumbar.bpk.go.id). Pemerintah daerah di Indonesia belum sepenuhnya berhasil mencapai tingkat kemandirian keuangan yang diharapkan. Masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu pemerintah daerah yang masih menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut dibuktikan pada rincian penerimaan dana perimbangan provinsi di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Provinsi Sumatera Barat masuk 10 besar daerah penerima dana perimbangan terbesar pada tahun 2019 yakni berupa dana alokasi umum (djpk.kemenkeu.go.id).

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dikutip dari djpk.kemenkeu.go.id pada tahun 2019, bahwa Provinsi Sumatera Barat masuk dalam 10 provinsi dengan penerimaan dana alokasi umum terbesar dengan nilai sebesar Rp 13,9 triliun.

Hal ini mencerminkan masih besarnya ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terhadap anggaran dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Jika dilihat dari rata-rata kinerja keuangan daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 mempunyai tingkat kemandirian keuangan daerah di bawah 25%. Tingkatan ini menunjukkan bahwa masih banyak Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki rasio kemandirian keuangan daerah dengan pola hubungan instruktif, yang berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dalam pembiayaan daripada pemerintah daerah karena daerah belum maksimal dalam melaksanakan otonomi daerah (Halim, 2012). Hanya Kota Padang yang memiliki rata-rata kinerja keuangan daerah yang melebihi 25% dengan pola hubungan konsultatif, yang berarti campur tangan pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah sudah berkurang.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat belum dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerahnya dan mengelola dengan menggunakan keuangannya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Pendapatan dari PAD seharusnya menjadi sumber pendapatan utama dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah karena pendapatan tersebut digali dari potensi daerah dan daerah memiliki akses penuh dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Namun, pada kenyataannya sumber pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar berasal dari dana perimbangan. Hal ini menunjukkan rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber potensial keuangan semaksimal mungkin khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Groves (2003) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor kesejahteraan dan faktor finansial. Aziz (2016) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan ukuran legislatif. Djuniar et al (2021) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah umur pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, kemakmuran, belanja modal, temuan SPI dan opini audit. Pada penelitian ini, fokus pada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu *leverage*, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah.

Leverage yang dapat diartikan sebagai kewajiban, termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Istilah *leverage* lebih sering digunakan di sektor swasta. *Leverage* menunjuk pada utang yang dimiliki perusahaan. Halim (2007) menyatakan bahwa bagi perusahaan swasta atau lembaga yang bersifat komersial umumnya menggunakan rasio *leverage* untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur. Pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditur pemerintah daerah dan calon kreditur dalam mengambil keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditur untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang.

Sari (2016) mendefinisikan *leverage* sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa bergantung suatu daerah pada kreditur untuk membiayai asetnya. Daerah dengan tingkat utang yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan hutang dan perlu mencari cara untuk mengurangi utang tersebut (Minarsih, 2015). Oleh karena itu, semakin besar *leverage*, maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang, menggambarkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah

sehingga mengakibatkan rendahnya kinerja keuangan entitas tersebut (Kusumawardani, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015) dan Darmanto (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jumlah penduduk merupakan bagian dari faktor lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Chairany (2010) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar, maka pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah daerah akan memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat (Darmanto, 2012). Pandeya & Oyama (2019) berpendapat bahwa populasi yang lebih besar dapat memberikan pajak yang lebih besar dan dapat memiliki kapasitas sumber daya yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah sosial ekonomi serta dapat menghasilkan fasilitas untuk memberikan layanan kepada banyak orang. Dengan demikian, jelas bahwa jumlah populasi yang lebih besar dapat meningkatkan skala ekonomi pemerintah daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Patriati (2010) menjelaskan bahwa jumlah penduduk berhubungan erat dengan pendapatan khususnya pendapatan pajak daerah bagi yang memiliki NPWP atau tergolong menengah ke atas dan pendapatan retribusi daerah yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah dan tidak memiliki NPWP demi terciptanya pemerataan yang baik. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan objek pajak daerah dan retribusi daerah bertambah luas sehingga penerimaan daerah akan meningkat yang mengakibatkan kinerja keuangan daerah dalam memberikan pelayanan publik akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Darmanto (2012) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Indonesia.

Umur pemerintahan daerah juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Umur pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa lama pemerintah daerah tersebut berlangsung sejak didirikan. Setyaningrum (2014) mendefinisikan umur pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang sudah lama berdiri dapat dikatakan lebih mandiri dalam hal ekonomi dibandingkan daerah yang baru pemekaran. Semakin memadai sumber daya yang ada, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kinerja keuangan pemerintah yang baik tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Pratiwi (2016) menjelaskan bahwa semakin lama atau semakin tua suatu pemerintah daerah berarti pemerintahan daerah tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola daerahnya. Pengalaman yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah daerah menjalankan sistem administrasinya yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan keuangan. Semakin berpengalaman suatu pemerintah daerah diharapkan proses administrasi tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Djuniar et al (2021) dan Setyaningrum (2014) menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu di atas, penelitian tersebut masih memiliki perbedaan pada hasil penelitiannya yang disebabkan oleh setiap kondisi daerah yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dan sumber pemasukan yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk memperjelas kembali temuan-temuan peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah pada setiap periode dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang dan juga sebagai gambaran bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan arah dan strategi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) menjelaskan bahwa tidak ada situasi dimana manajemen dimotivasi oleh tujuan individu tetapi terfokus pada tujuan utama yaitu kepentingan organisasi. Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang dirancang untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak untuk kepentingan pemilik. Jika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentang. *Steward* merasa kebaikan bersama dan berperilaku sejalan dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang wajar karena *steward* lebih mementingkan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Implikasi dari teori stewardship dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat diandalkan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta dapat memberikan tanggung jawab keuangan yang dipercayakan kepada mereka sehingga tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Jika tujuan ini dapat dicapai oleh pemerintah daerah yang bertindak sebagai *steward*, maka rakyat selaku *principal* akan puas dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mulyani & Wibowo (2017) mendefinisikan kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja dalam bidang keuangan daerah termasuk pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditentukan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama periode anggaran. Verawaty et al (2020) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator yang ada di daerah dan mampu menelusuri serta mengelola seluruh aset daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahan, melayani masyarakat dan pembangunan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran dari pencapaian kinerja kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penggunaan APBD sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah menghimpun dana dari daerahnya dan upaya pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan dan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah.

Leverage

William (2010) mendefinisikan *leverage* adalah rasio utang terhadap aset, artinya sejauh mana pemerintah daerah telah menggunakan utang jangka panjang untuk membiayai asetnya. Sari (2016) mendefinisikan *leverage* sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa tergantung suatu daerah pada kreditur untuk membiayai asetnya. Daerah dengan tingkat utang yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah perbandingan antara utang pemerintah daerah dengan ekuitas atau aset yang digunakan kreditur untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian,

pemerintah daerah dengan tingkat hutang yang tinggi maka diprediksi memiliki tingkat risiko yang tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang buruk karena pendanaannya sebagian besar berasal dari pihak eksternal.

Jumlah Penduduk

UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 menjelaskan penduduk merupakan warga Negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Chairany (2010) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu daerah dan memiliki mata pencarian tetap di daerah serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan atau pengkategorian seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan. Semakin besar populasi penduduk berarti tingkat permintaan dan penawaran akan meningkat serta menguntungkan banyak pihak dengan kata lain semakin besar jumlah penduduk, maka akan meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Umur Pemerintah Daerah

Setyaningrum (2014) mendefinisikan umur pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut. Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pembentukan daerah ditentukan oleh hukum. Pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau membagi suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Maka dapat disimpulkan bahwa umur pemerintahan daerah adalah tahun terbentuknya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah yang sudah lama berdiri dapat dikatakan lebih mandiri dalam hal ekonomi dibandingkan daerah yang baru pemekaran. Semakin memadai sumber daya yang ada, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kinerja keuangan pemerintah yang baik tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Halim (2007) menyatakan bahwa bagi perusahaan swasta atau lembaga yang bersifat komersial umumnya menggunakan rasio *leverage* untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur. Pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio *leverage* ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang dengan ekuitas. William (2010) mendefinisikan *leverage* adalah rasio utang terhadap aset, artinya sejauh mana pemerintah daerah telah menggunakan utang jangka panjang untuk membiayai asetnya. Sari (2016) mendefinisikan *leverage* sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa tergantung suatu daerah pada kreditur untuk membiayai asetnya. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Rioni (2019) hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* keuangan suatu organisasi, maka menunjukkan semakin rendah kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena sumber pendanaan utama berasal dari pihak luar. Apabila pemerintah daerah memiliki utang yang besar, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah dinilai kurang mampu memanfaatkan potensi sumber ekonomi yang ada sehingga untuk menjalankan kegiatannya diperlukan dana dari pihak eksternal (Sari, 2016).

Berdasarkan teori *stewardship* yang digunakan dalam penelitian ini, dimana pemerintah daerah akan termotivasi untuk berbuat baik terhadap masyarakat. Cara terbaik bagi *steward* yaitu dengan tidak menggunakan sumber pendanaan dari luar untuk membiayai

kegiatan pemerintah. Jika pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintah berasal dari pihak luar dan jika pemerintah tidak mampu membayar kewajiban tersebut, maka akan menurunkan atau memperburuk kinerja keuangan daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Minarsih (2015) dan Darmanto (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 menjelaskan bahwa penduduk merupakan warga Negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Chairany (2010) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk disuatu daerah tentunya memiliki peran yang berbeda-beda. Penduduk bisa menjadi konsumen dan produsen. Semakin besar populasi penduduk akan meningkatkan permintaan dan penawaran sehingga menguntungkan banyak pihak, dengan demikian semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Melalui kegiatan ekonomi tersebut, maka akan meningkatkan pungutan yang akan masuk ke dalam kas daerah seperti pajak maupun retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan teori *stewardship* yang digunakan dalam penelitian ini, dimana masyarakat sebagai penduduk telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mengedepankan kerjasama dengan masyarakat yaitu memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai dan didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai serta mendukung terciptanya kinerja keuangan daerah yang baik. Jika tujuan ini tercapai oleh pemerintah daerah, maka masyarakat akan merasa puas dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Darmanto (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa lama pemerintah daerah tersebut berlangsung sejak didirikan. Setyaningrum (2014) mendefinisikan umur pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut. Semakin lama atau semakin tua suatu pemerintah daerah berarti pemerintahan daerah tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola daerahnya yang berakibat pada kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat. Pengalaman yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah daerah menjalankan sistem administrasinya yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan keuangan. Semakin berpengalaman suatu pemerintah daerah diharapkan proses administrasi tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga secara langsung akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan suatu daerah.

Berdasarkan teori *stewardship* yang digunakan dalam penelitian ini, dimana pemerintah daerah yang terbentuk lebih dahulu akan lebih berpengalaman dalam melakukan pengelolaan sumber daya sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kinerja

keuangan pemerintah yang baik tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat (*principal*). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melalui umur administratif seharusnya suatu daerah harus mampu menunjukkan tujuan dan kesadaran *steward* dengan lebih meyakinkan *principal* bahwa daerah tersebut telah cukup mapan dan berpengalaman, sehingga *principal* akan merespon melalui harapan akan adanya kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Djuniar et al (2021) dan Setyaningrum (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah sembilan belas (19) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *total sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 sampel yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sedangkan jumlah penduduk diambil dari data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) dan umur pemerintah daerah diambil dari *website* masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 yang diperoleh melalui *website* sumbar.bpk.go.id, sedangkan jumlah penduduk diambil dari *website* sumbar.bps.go.id dan umur pemerintah daerah diambil dari *website* masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data, dari dokumen tersebut peneliti mengambil data berdasarkan dokumen yang menjadi sumber. Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang bersifat numerik dan objektif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur lain seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini di proksikan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, retribusi dan lain-lain sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Leverage

dalam penelitian ini diukur menggunakan *debt to equity ratio* untuk mengukur *leverage* pemerintah daerah. Rasio *leverage* diukur dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas yang tersaji dalam laporan neraca.

$$\text{Debt to Equity} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah penduduk yang mendiami suatu daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat atau diukur menggunakan proyeksi dengan dasar sensus penduduk tahun 2016-2020.

Umur Pemerintah Daerah (X3)

Umur pemerintah daerah mengacu pada usia sejak dibentuknya pemerintah daerah atau disahkan sebagai pemerintah kabupaten/kota yang dihitung dari tahun pengesahan hingga tahun pengamatan. Umur pemerintah daerah pada penelitian ini diukur menggunakan Logaritma Natural (LN), karena umur yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah berbeda.

$$\text{Umur Pemerintah Daerah} = \text{LN}(\text{Umur Pemerintah Daerah})$$

Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengubah data penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dalam suatu penelitian. Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan, diolah dengan menggunakan rumus atau aturan yang sudah ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah untuk memperoleh informasi relevan yang terkandung dalam data dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Pada penelitian ini, untuk mengolah data tersebut peneliti menggunakan alat bantu berupa software statistik yang disebut SPSS. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 26 untuk memprediksi pengaruh antara variabel independen yaitu *leverage*, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dengan model persamaan sebagai berikut:

$$\text{KKPD} = \alpha + \beta_1 \text{LEV} + \beta_2 \text{JP} + \beta_3 \text{UPD} + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LEV	79	.01	3.68	.7899	.64477
JP	79	10.85	13.38	12.2254	.71047
UPD	79	2.48	5.46	3.8861	.87766
KKPD	79	4.14	19.28	10.1676	3.92152
Valid N (listwise)	79				

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1, variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai minimum 4,14 dan nilai maksimum 19,28 dengan nilai rata-rata 10,1676 dan standar deviasi 3,92152. Variabel independen pertama pada penelitian

ini adalah *leverage* menunjukkan nilai minimum 0,01 dan nilai maksimum 3,68 dengan nilai rata-rata 0,7899 dan standar deviasi 0,64477. Variabel independen kedua pada penelitian ini adalah jumlah penduduk menunjukkan nilai minimum 10,85 dan nilai maksimum 13,38 dengan nilai rata-rata 12,2254 dan standar deviasi 0,71047. Variabel independen ketiga pada penelitian ini adalah umur pemerintah daerah menunjukkan nilai minimum 2,48 dan nilai maksimum 5,46 dengan nilai rata-rata 3,8861 dan standar deviasi 0,87766.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorof-Smirnof Test)

		Unstandardized Residual	
N		79	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.52851569	
Most Extreme Differences	Absolute	.095	
	Positive	.095	
	Negative	-.065	
Test Statistic		.095	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 ^c	

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas pada penelitian ini memiliki probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,073 di atas nilai signifikansi kepercayaan 0,05 berarti data penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LEV	.921	1.086
	JP	.901	1.110
	UPD	.949	1.054

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.168	1.126		2.813	.006
	LEV	.023	.374	.007	.061	.951
	JP	-2.763E-6	.000	-.194	-1.622	.109
	UPD	.092	.271	.040	.340	.735

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap variabel independen pada penelitian memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.436 ^a	.190	.158	3.59839	1.100

a. Predictors: (Constant), UPD, LEV, JP

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) adalah sebesar 1,100. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai D-W berada diantara -2 sampai +2 ($-2 < D-W < +2$) yaitu $-2 < 1,100 < +2$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen pada penelitian ini, sehingga model regresi layak digunakan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.019	1.981		2.029	.046
	LEV	1.681	.658	.276	2.552	.013
	JP	-6.663E-6	.000	-.243	-2.224	.029
	UPD	1.666	.477	.373	3.496	.001

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Model regresi linear berganda yang didapatkan berdasarkan tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$KKPD = 4,019 + 1,681 LEV - 6,663E-6 JP + 1,666 UPD + e$$

Nilai konstanta yang diperoleh dari persamaan ini bernilai positif sebesar 4,019, artinya jika variabel *leverage*, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah bernilai 0, maka nilai variabel kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 4,019. Nilai koefisien regresi variabel *leverage* bernilai positif sebesar 1,681, artinya setiap peningkatan *leverage* sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,681. Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk bernilai negatif sebesar -6,663E-6, artinya setiap peningkatan jumlah penduduk sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -6,663E-6. Nilai koefisien regresi variabel umur pemerintah daerah bernilai positif sebesar 1,666, artinya setiap peningkatan umur pemerintah daerah sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,666.

Pengujian Hipotesis

Uji F (F-Test)

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228.378	3	76.126	5.879	.001 ^b
	Residual	971.133	75	12.948		
	Total	1199.511	78			

a. Dependent Variable: KKPD

b. Predictors: (Constant), UPD, LEV, JP

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikan hasil uji F adalah sebesar 0,001, berarti $0,001 < 0,05$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengaruh *leverage* (X1), jumlah penduduk (X2) dan umur pemerintah daerah (X3) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

Uji T (Parsial)

Tabel 8
Hasil Uji Statistik T

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.019	1.981		2.029	.046
	LEV	1.681	.658	.276	2.552	.013
	JP	-6.663E-6	.000	-.243	-2.224	.029
	UPD	1.666	.477	.373	3.496	.001

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil variabel *leverage* memiliki nilai signifikan sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa *leverage* secara signifikan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai signifikan sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel jumlah penduduk secara signifikan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel umur pemerintah daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel umur pemerintah daerah juga memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R-Square*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.436 ^a	.190	.158	3.59839	1.100

a. Predictors: (Constant), UPD, LEV, JP

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* pengaruh x1 sampai x3 secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah senilai 0,158, artinya pengaruh variabel *leverage*, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 15,8%, sedangkan sisanya sebesar 84,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji statistik t menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa jika *leverage* mengalami kenaikan pada suatu pemerintah daerah, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai *leverage* yang tinggi, maka pemerintah daerah tersebut dapat menggunakan dana ekuitas untuk menutupi kewajibannya, hal ini berarti kewajiban pemerintah daerah tersebut dapat diminimalisir sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tidak terbebani daerah oleh sumber pendapatan dari pihak eksternal berupa pinjaman atau utang. Selain itu, pemerintah daerah yang memiliki pinjaman yang besar kepada kreditur akan semakin memperbaiki kinerja keuangan daerah dikarenakan kreditur akan melihat apakah daerah benar-benar dapat melunasi pinjaman yang telah diberikan atau tidak. Oleh karena itu, dengan adanya utang kepada pihak eksternal akan membuat daerah lebih hati-hati dalam pembuatan keputusan publik agar tidak menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar *leverage* maka pemerintah daerah akan semakin mandiri. Hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah daerah bagus dalam mengelola utang untuk keperluan pelayanan publik sehingga masyarakat semakin sejahtera serta adanya pengawasan yang ketat kepada daerah untuk menjamin pengembalian pinjaman daerah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015) dan Darmanto (2012).

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji statistik t menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H_2 ditolak. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa jika jumlah penduduk mengalami kenaikan pada suatu pemerintah daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin rendah.

Peran jumlah penduduk dalam meningkatkan pendapatan daerah berupa penerimaan pajak dan retribusi daerah belum berjalan sesuai dengan mestinya, seharusnya dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan objek pajak dan retribusi bertambah luas sehingga penerimaan daerah dapat meningkat dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik akan semakin baik (Patriati, 2010). Peningkatan pendapatan daerah ini kemudian akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah di suatu kabupaten/kota sehingga daerah tersebut dapat mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bisa tercapai secara maksimal. Namun pada kenyataannya, peran jumlah penduduk dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengaruh negatif jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan masih banyaknya penduduk yang tidak patuh pajak dan penghasilan yang diperoleh masyarakat juga cenderung kecil sehingga tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak. Hal ini akan berdampak pada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah yang belum bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam mengawasi penganggaran.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah akan terdorong untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti jumlah penduduk suatu daerah akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dan mengalokasikan belanja dengan baik agar dapat menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natoen et al (2019).

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji statistik t menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H_3 diterima. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah yang sudah lama berdiri dapat dikatakan lebih mandiri dalam hal ekonomi dibandingkan daerah yang baru pemekaran, semakin memadai sumber daya yang ada, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, umur pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki umur administrasi lebih lama atau lebih tua, dapat dikatakan pemerintah daerah tersebut lebih berpengalaman dalam mengelola pemerintahan daerahnya dibandingkan dengan daerah yang memiliki usia yang lebih muda. Pengalaman yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah daerah

menjalankan sistem administrasinya yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan keuangan. Semakin berpengalaman suatu pemerintah daerah diharapkan proses administrasi tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan suatu daerah (Pratiwi, 2016). Dengan demikian, semakin lama suatu pemerintah daerah berdiri, maka dapat menjamin bahwa pemerintah daerah bisa lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djuniar et al (2021) dan Setyaningrum (2014).

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh *leverage*, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (2) Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (3) Umur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya menggunakan tahun pengamatan dari tahun 2016-2020, hal ini dikarenakan data pada tahun sebelumnya belum tersedia secara lengkap pada *website* sehingga tidak dapat membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun agar memperoleh hasil yang lebih maksimal dan akurat. (2) Nilai *adjusted R2* adalah 15,8% yang berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hanya 15,8%, sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: Bagi pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan faktor yang bisa meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah supaya kinerja keuangan pemerintah daerah bisa lebih ditingkatkan dan diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat agar lebih optimal dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang relevan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan objek yang lebih besar sehingga akan memperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Indonesia serta dapat menambahkan sumber data yang digunakan maupun jangka waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur).

- Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 86–101. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Diakses pada 24 Februari 2022. Dari: <https://sumbar.bps.go.id>.
- Chairany, M. (2010). Analisis Total Penduduk Kecamatan Padang Bolak Pada Tahun 2012. (Tugas Akhir). *Medan: Universitas Sumatera Utara*. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Darmanto, H. C. (2012). Pengaruh Population, Employment, Size dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Djuniar, L., Sunardi, S., Sari, D., & Satria, E. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5(01), 50–61. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Diakses pada 10 Maret 2022. Dari: www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Groves, S. M., W.M. Godsey, dan M.A. Shulman. (2003). Financial Indicator for Local Government. *Public Finance International City Management Association* 9: 243-255. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Penerbit Salemba Empat. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Kusumawardani, Meidia. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*, 1(1):27:35. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Diakses pada 10 Maret 2022.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Natoen, A., Febrianti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Pilcher, R., & Pilcher, R. (2006). Local government financial key performance indicators—not so relevant, reliable and accountable. *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 54 Iss 5/6 pp. 451 – 467. <https://doi.org/10.1108/17410400510604584>. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Patriati, R. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Pratiwi, N. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia* (Doctoral dissertation, STIE YKPN). Diakses pada 18 Agustus 2022.

- Pandeya, G. P., & Oyama, T. (2019). Revitalizing Local Government Performance Management: Further Dissecting the Role of Socioeconomic Status and Social Mobilization Policy. *Local Government Studies*, 45(6), 869–892. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1585817>. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon., dan Novi Budiarmo. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3 (4), hal.23-32. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Rangkiang Data*. <http://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data/index.html>. Diakses pada 10 Maret 2022.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2014). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra)* (Doctoral dissertation, Riau University). Diakses pada 24 Februari 2022.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120. Diakses pada 01 Maret 2022.
- Turley, G., Robbins, G., & McNena, S. (2015). A Framework to Measure the Financial Performance of Local Governments. *Local Government Studies*, 41(3), 401–420. <https://doi.org/10.1080/03003930.2014.991865>. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 ayat 2 Tentang *Warga Negara Indonesia*. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Diakses pada 18 Agustus 2022.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>. Diakses pada 01 Maret 2022.
- William C. Rivenbark, Dale J. Roenigk, Gregory S. Allison. (2010). Conceptualizing Financial Condition In Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 22(2), 49-177. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-22-02-2010-B001>. Diakses pada 18 Agustus 2022.